

**IKU Biro Perekonomian Tahun 2024-2026**

Sasaran Strategis	Indikator	Definisi Operasional	Perhitungan	Penjelasan
Meningkatkan Kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	Biro Perekonomian memfasilitasi proses penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian yang merupakan amanat dari pemerintah pusat untuk di tindak lanjuti di daerah dalam bentuk Surat Keputusan, Surat Edaran dll.	$\frac{\text{Realisasi Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian}}{\text{Target Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian}} \times 100\%$	<p>Kebijakan daerah di bidang perekonomian yang dirumuskan merupakan amanah dan turunan dari kebijakan di tingkat pusat yang meliputi : Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah, Program Penurunan Emisi Karbon dan Participating Interest 10 %</p> <p>Dalam pelaksanaan program ini melibatkan koordinasi antar SKPD antara lain : Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas PTPH, Dinas Peternakan dan Keswan, Disperindagkop, Dinas ESDM, Dinas LH, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, dan stakeholder terkait.</p>
	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian	Kebijakan Daerah yang ditetapkan berkaitan dengan kontribusi BUMD dalam menyumbang PAD dalam bentuk Peraturan Gubernur.	$\frac{\text{Jumlah Nominal yang disetorkan per target menjadi PAD}}{\text{Jumlah Nominal Target}} \times 100\%$	<p>Kebijakan Daerah yang ditetapkan berkaitan dengan kontribusi BUMD dalam menyumbang PAD. Dalam pelaksanaan program ini melibatkan koordinasi antar SKPD antara lain : Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas PTPH, Dinas Peternakan dan Keswan, Disperindagkop, Dinas ESDM, Dinas LH, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Bankaltimara, dan stakeholder terkait.</p>